

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal

Manajer memiliki kewajiban memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas informasi terkait kinerja perusahaan. Dalam perkembangannya terkadang manajer memberikan informasi yang asimetris kepada pengguna laporan keuangan khususnya para *principal*, dimana pada informasi tersebut mengandung informasi yang tidak merepresentasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perilaku manajer tersebut bisa dilihat ketika mereka melakukan tindakan melebih-lebihkan laba (*overstate*), disinilah peranan konservatisme akuntansi untuk mencegah perilaku manajer dari tindakan tersebut. Manajemen yang menerapkan akuntansi konservatif biasanya tercermin dalam menghitung beban depresiasi yang tinggi sehingga menghasilkan laba rendah dalam waktu yang relatif permanen dan berefek jangka panjang pada penurunan laba di masa yang akan datang. Watts (2003a dalam Dwiyana 2007) menyatakan bahwa *understatement* aktiva bersih yang sistematis atau relatif permanen merupakan *hallmark* konservatisme akuntansi, sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme akuntansi menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*.

Penman dan Zhang (2002) dalam Dwiyanu (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi mencerminkan kebijakan akuntansi yang permanen. Secara empiris penelitian mereka menunjukkan bahwa *earnings* yang berkualitas diperoleh jika manajemen menerapkan akuntansi konservatif secara konsisten tanpa adanya perubahan metode akuntansi atau perubahan estimasi.

Penggunaan rasio nilai pasar terhadap nilai buku (*market to book ratio*) untuk melihat status ekuitas perusahaan (saham perusahaan) secara menyeluruh. Rasio tersebut merangkum pandangan investor tentang perusahaan secara keseluruhan, manajemennya, laba, likuiditasnya, dan prospek masa depannya (Walsh, 2003 dalam Dwiyanu 2007). Dengan penggunaan rasio ini dapat melihat reaksi pasar atas sinyal positif dari perusahaan tentang adanya penerapan konservatisme akuntansi yang disajikan melalui laporan keuangan.

Dengan penerapan akuntansi konservatif yang dilakukan oleh manajemen dapat menghasilkan laba yang *understatement* dan merupakan sinyal yang positif kepada investor bahwa mereka telah menerapkan akuntansi konservatif untuk menghasilkan laba yang berkualitas, sehingga diharapkan investor dapat menilai lebih tinggi perusahaan.

2. Akuntansi Konservatif Dengan Ukuran Aktual

Akuntansi konservatif tidak hanya berkaitan dengan penerapan suatu metode akuntansi tetapi dipengaruhi juga oleh estimasi dalam penilaian suatu ekuitas dalam perusahaan. Penerapan metode akuntansi tersebut dengan menurunkan laba atau aktiva bersih ketika menghadapi *bad news* namun tidak meningkatkan laba atau aktiva bersih ketika menghadapi *good news*.

Konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisikan sebagai antisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba (Bliss dalam Watts, 2002 dalam Lo, 2005).

Menurut Watts (2003, dalam Lo, 2005) konservatisme akuntansi dalam kaitannya dengan manajemen laba dapat dilihat dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Cadangan aktiva bersih yang *understatement*
- b. Return saham yang negatif dihapuskan sehingga memberikan hubungan *earnings/ stock return* yang asimetrik.
- c. Kerugian awal bersifat sementara, dan akan meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang melalui pemakaian cadangan.

Chan *et al.* (2001) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006), menguji apakah return saham yang akan datang akan merefleksikan informasi mengenai kualitas laba saat ini. Kualitas laba diukur dengan akrual. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, demikian juga sebaliknya.

Sementara itu menurut Wolk *et al.* (2001, dalam Hamonangan dan Mas'ud, 2006) mendefinisikan konservatisme sebagai berikut:

- a. Memperlambat pengakuan *revenues*.
- b. Mempercepat pengakuan *expenses*.
- c. Merendahkan nilai aktiva.
- d. Meninggikan penilaian utang.

Dari pemahaman tersebut diatas dapat dilihat bahwa akrual diskresioner dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan sehingga diharapkan pengguna laporan keuangan dapat membedakan mana perubahan laba yang dilakukan atas dasar kebijakan akuntansi konservatif dengan perubahan laba yang disebabkan oleh manajemen laba. Penelitian ini hanya meneliti akrual diskresioner yang disebabkan oleh akuntansi konservatif.

3. Penilaian Perusahaan

Penilaian ekuitas perusahaan dalam penelitian menggunakan proksi *market to book ratio* karena berpengaruh dalam pengambilan kebijakan metode akuntansi yang dipakai. Penggunaan rasio nilai pasar terhadap nilai buku (*market to book ratio*) untuk melihat status ekuitas perusahaan (saham perusahaan) secara menyeluruh. Rasio tersebut merangkum pandangan investor tentang perusahaan secara keseluruhan, manajemennya, laba, likuiditasnya, dan prospek masa depannya (Walsh, 2003 dalam Dwiyana 2007). Dengan penggunaan rasio ini dapat melihat reaksi pasar atas sinyal positif dari perusahaan tentang adanya penerapan konservatisme akuntansi yang disajikan melalui laporan keuangan.

4. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dengan penerapan mekanisme tersebut dapat mengurangi asimetri informasi yang mungkin terjadi dalam proses pelaporan keuangan suatu entitas. Penerapan konsep tersebut dilakukan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi (pengawasan) dan *controlling* kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*. Tujuan utama penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* adalah terciptanya transparansi bagi pengguna laporan keuangan dalam hal pengelolaan perusahaan.

Menurut Marihot dan Doddy (2007), apabila mekanisme *GCG* diterapkan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi perusahaan diharapkan dapat meningkat seiring dengan transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan pada akhirnya menguntungkan semua pihak.

Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Meneg BUMN, *corporate governance* dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang kesemuanya *bertujuan* untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif dengan pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stake holder terkait. Jadi semakin jelas dari uraian ini konsep *GCG* akan membawa manfaat bagi penciptaan pertambahan nilai untuk berbagai pihak pemegang kepentingan (*stakeholders*), yang meliputi pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern.

Corporate Governance didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajemen, kreditor, pemerintah dan *stakeholder* lainnya baik internal maupun eksternal,

sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, dalam Marihot dan Deddy, 2007). Iskandar dkk (1999), dalam Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholder* untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan *return*. Selain itu, *corporate governance* dapat menjamin direksi maupun manajer agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (Prowson, 1998 dalam Theresia, 2005, dalam Arief dan Bambang, 2007).

Dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) terdapat empat prinsip dasar (Linan, 2000 dalam Arief dan Bambang, 2007).

Empat prinsip tersebut adalah:

- a. Keadilan (*fairness*) yang meliputi: (a) Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham, (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
- b. Transparansi (*transparancy*) yang meliputi: (a) Pengungkapan informasi yang bersifat penting, (b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, (c) Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu, dan efisien.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang meliputi pengertian bahwa: (a) Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, (b) Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, (c) Adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*) meliputi: (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Dengan penerapan mekanisme *corporate governance* dapat diambil beberapa manfaat antara lain (Aditya, 2005 dalam Ratna, 2006):

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders* dan *dividen*. Khusus bagi BUMN akan meningkatkan penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

- e. Terjaminnya keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil mencerminkan dan melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, kreditor dan *stakeholder* lainnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan

Menurut Bliss dalam Watts (2002, dalam Dwiyana, 2007) secara tradisional konservatisme dilakukan untuk mengantisipasi semua kerugian namun tidak mengantisipasi laba. Mengantisipasi kerugian dimaksud dengan melakukan pengakuan kerugian sebelum suatu verifikasi secara hukum dilakukan oleh manajemen. Konservatisme merupakan asimetri dalam permintaan verifikasi terhadap laba dan rugi. Akibat dari asimetri tersebut menyebabkan pengakuan laba menjadi *understatement* pada periode saat ini, namun akan mengakibatkan *overstatement* pada laba di periode mendatang.

Menurut Givoly dan Hayn (2002, dalam Dwiyana, 2007), menyatakan bahwa pihak auditor dan manajer melakukan proteksi terhadap perusahaannya dengan melakukan akuntansi yang konservatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Givoly dan Hayn tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penman dan Zhang (2002) yang menyatakan bahwa *earnings* yang berkualitas diperoleh jika manajemen menerapkan akuntansi konservatif tanpa melakukan perubahan metode akuntansi ataupun estimasi.

Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pada umumnya melakukan konservatisme akuntansi (Widya, 2004). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa total akrual (*discretionary* dan *non-discretionary accrual*) berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian ekuitas perusahaan.

Penerapan metode akuntansi konservatif yang dilakukan oleh manajer bertujuan untuk memberikan sinyal positif kepada investor ataupun *stakeholder* lainnya bahwa perusahaan tersebut melakukan akuntansi konservatif yang menghasilkan laba yang berkualitas sehingga diharapkan investor ataupun *stakeholder* lainnya dapat menilai lebih tinggi terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar dan Wilopo (2002) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dengan manajemen laba memiliki korelasi yang negatif, artinya semakin konservatif suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan manajer melakukan tindakan manajemen laba, sehingga penerapan konservatisme akuntansi dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek manajemen laba dan pada akhirnya meningkatkan kualitas laba sebagai salah satu indikator nilai perusahaan.

Hasil penelitian Sekar dan Wilopo (2002) juga menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin besar penerapan konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan, maka semakin baik nilai perusahaan. Prinsip konservatisme memiliki *value relevance*, artinya dengan menggunakan prinsip

konservatisme laporan keuangan yang disajikan juga dapat menunjukkan nilai pasar perusahaan.

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh kualitas laba, praktik manajemen laba dapat mengakibatkan kualitas laba yang disajikan menjadi rendah (Hamonangan dan Mas'ud, 2006). Selain itu, penilaian ekuitas juga sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode akuntansi yang digunakan perusahaan (Dwiyana, 2007).

Penelitian yang dilakukan Dwiyana (2007) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penilaian perusahaan, artinya investor atau kreditor dapat menangkap sinyal yang dilakukan oleh manajemen bahwa perusahaan telah melakukan akuntansi konservatif dan mengharapkan penilaian lebih dengan memberikan premium tinggi bagi harga saham perusahaan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diturunkan hipotesis:

H₁: Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial, Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan

Penerapan konservatisme akuntansi menuai pro dan kontra, banyak kalangan dari akademisi maupun peneliti yang mengkritik penerapan akuntansi konservatif, menurut mereka semakin konservatif metode akuntansi suatu perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin bias atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sebaliknya, pihak yang mendukung penerapan konservatisme akuntansi menyatakan bahwa akuntansi dapat menghasilkan laba yang berkualitas dan mencegah manajemen melakukan

tindakan melebih-lebihkan laba (*overstate*). Dari fenomena tersebut penulis memasukkan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Hapsoro (2006), secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen (*corporate governance*) dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Pertama adalah mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri dari struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme spesifik eksternal negara yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.

Dalam teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* yang menjalankan perusahaan akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Konflik tersebut dapat diminimalisir dengan kepemilikan manajer terhadap perusahaan yang dikelolanya. Menurut Ross *et al.* (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham maupun kepentingannya sendiri.

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2007), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis hal tersebut berarti semakin rendah kepemilikan manajerial terhadap perusahaan maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer semakin tinggi. Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat

menjadi solusi perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Hamonangan dan Mas'ud, 2007). Sehingga diharapkan dengan kepemilikan manajerial terhadap perusahaan diasumsikan dapat menyelesaikan permasalahan keagenan.

Menurut Smith (1976), *income smoothing* secara signifikan sering dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya. Hal ini diperkuat dengan penelitian Sandra dan Kusuma (2004) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap reaksi pasar dan mampu memoderasi interaksi *income smoothing* dengan reaksi pasar.

Hamonangan dan Mas'ud (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba. Sensitivitas manajemen terhadap pengaruh para pemegang saham akan tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manajemen. Manajer yang memiliki kontrol kepemilikan yang besar terhadap perusahaan akan menghindari *self serving behaviour* dengan melakukan tindakan manajemen laba, dan cenderung akan semakin konservatif untuk meningkatkan kualitas laba.

Untung dan Hartini (2006), menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara langsung maupun dari keputusan pendanaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Hanung (2007) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang dipakai pada perusahaan yang mereka kelola. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan menerapkan metode konservatisme akuntansi (Ross *et al.* 1999 dalam Dwiyana, 2007). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H_{2a}: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) salah satu variabel yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif adalah dewan komisaris yang dapat mengendalikan perilaku manajer dari *self-serving behavior*. Selain itu peranan dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi. Semakin besar jumlah komisaris maka fungsi *service* dan kontrol terhadap perusahaan akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Fama dan Jensen, 1983 dalam Kusumawati dan Riyanto, 2005). Vafeas (2000) dalam Hamonangan dan Mas'ud, mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas laporan keuangan.

Ukuran dewan komisaris juga dapat mempengaruhi kemampuan memonitor pelaporan keuangan. Midiastuty (2003) dalam Mudjiyanti (2005), menyimpulkan bahwa mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran atau jumlah dewan mampu mengurangi konflik diantara *stakeholders* dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dwi dan Bambang (2005) mengemukakan bahwa jumlah komisaris berhubungan dengan nilai perusahaan, fungsi *service* dan kontrol yang dilakukan oleh komisaris dapat meningkatkan nilai perusahaan. Besarnya dewan komisaris dapat dipandang sebagai suatu alat untuk memberikan masukan dan mengontrol perilaku oportunistik direksi dan manajemen.

Penelitian Beasley (1996) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006) menguji hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan melakukan perbandingan terhadap perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris eksternal (*independen*) dengan perusahaan yang tidak memiliki komisaris eksternal. Hasilnya persentase perusahaan yang memiliki komisaris eksternal dalam melakukan tindakan kecurangan lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki komisaris eksternal.

Hamonangan dan Mas'ud (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mizruchi (1983) dalam Dwiyana (2007) yang membuktikan bahwa dewan komisaris merupakan "*the ultimate center of*

control". Semakin besar jumlah komisaris fungsi *service* dan kontrol akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Fama dan Jansen, 1983 dalam Dwiyana, 2007).

Sedangkan menurut Yenmack (1996), Beasley (1996) dan Jesen (1993) dalam Arief dan Bambang (2007), dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibanding dengan dewan komisaris yang berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam melakukan komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Dwiyana (2007) juga membuktikan bahwa jumlah dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* merupakan variabel pemoderasi yang dapat menginteraksi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan meskipun pengaruhnya negatif. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_{2b}: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

4. Komite Audit, Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan

Komite audit dalam perusahaan bertanggungjawab dalam pengawasan laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *self-serving behavior* manajemen. Komite audit bertugas untuk membantu dewan

komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan adanya komite audit ini dapat memonitor pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Selain itu keberadaan komite audit akan mendorong diterapkannya konservatisme akuntansi perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Klein (2002) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006), menjelaskan bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen.

Komite audit sebagai penasihat komisaris harus mampu memastikan fungsi dewan komisaris dijalankan dengan baik secara strategis operasional dan memastikan bahwa Dewan Komisaris menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku.

DeZoort *et al.* (2002) dalam Debby (2007) menjelaskan bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu 1) dari sisi input (komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya) serta 2) dari sisi proses (harus memiliki etos kerja yang tinggi). Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat efektif bekerja sehingga bisa menghasilkan suatu output berupa laporan keuangan, internal kontrol dan manajemen resiko yang bisa dipercaya.

Pengukuran laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya merupakan suatu hal yang sulit. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kemungkinan terjadinya manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan yang diprosikan dengan akrual diskresioner (Xie *et al.* (2001), Chtourou *et al.* (2001), Bradbury *et al.* (2004), Parulian (2004), Wedari (2004) dalam Debby (2007).

Kalbers & Fogarty (1993) dalam Debby (2007) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu 1) kewenangan formal dan tertulis, 2) kerjasama manajemen dan 3) kualitas/kompetensi anggota komite audit (Effendi, 2005 dalam Debby (2007)). Selain itu, Effendi juga menambahkan masalah komunikasi dengan komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain sebagai aspek yang penting dalam keberhasilan kerja komite audit.

Dengan kewenangan, independensi, kompetensi dan komunikasi melalui pertemuan yang rutin dengan pihak-pihak terkait, diharapkan fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan dengan efektif sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya praktek manajemen laba yang oportunistik. Sehingga dengan diterapkannya faktor-faktor tersebut diatas diharapkan dapat membatasi kemungkinan terjadinya manajemen laba terhadap laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meingkatkan kualitas laba serta meningkatkan nilai perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H_{2c}: Komite audit berpengaruh positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

5. Kepemilikan Institusional, Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan

Fungsi monitoring dalam kaitannya dengan suatu perusahaan, kepemilikan institusional memegang peranan yang penting dibandingkan dengan kepemilikan individual. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan monitoring yang lebih baik karena melibatkan lebih banyak orang dan membawa kepentingan yang lebih besar ketimbang kepemilikan individual. Menurut Lee *et al.* (1992), dalam Fidyati (1999), menyebutkan dua perbedaan pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Penurunan kinerja yang berdampak pada penurunan laba perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan investor institusional. Dengan terjadinya penurunan laba yang didapat oleh perusahaan akan merubah kebijakan investor institusional yang mungkin akan melikuidasi sahamnya dari perusahaan. Apabila investor memiliki jumlah saham yang besar dan melakukan likuidasi maka akan berdampak pada nilai perusahaan secara keseluruhan.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa investor institusional adalah investor yang berpengalaman. Dalam artian bahwa investor institusional lebih terfokus pada laba di masa yang akan datang yang relatif mengharapkan jumlah lebih besar ketimbang laba sekarang, sehingga investor dapat melakukan monitoring yang lebih efektif terkait dengan kebijakan perusahaan. Suranta dan Machfoedz (2003) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2006), menyebutkan

bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional, dan ukuran dewan direksi.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba yang akan memperbesar kemungkinan untuk menerapkan akuntansi konservatif. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005 dalam Arief dan Bambang, 2007).

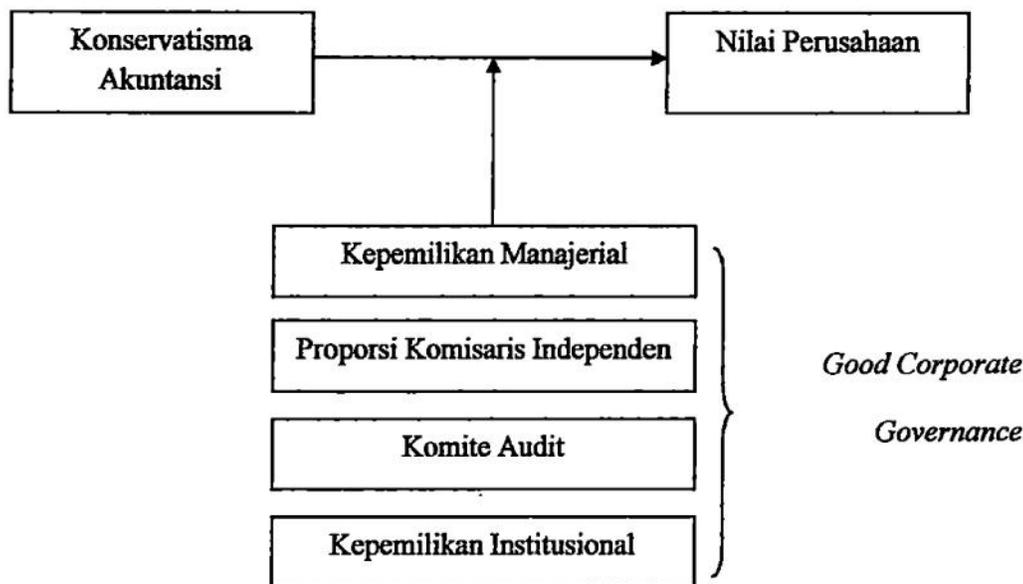
Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku manajer, tindakan pengawasan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga mengurangi perilaku oportunistik manajer (Cornett *et al.* (2006) dalam Arief dan Bambang (2007)).

Semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan memberikan kekuatan untuk menekan manajer dalam melakukan konservatisme akuntansi maupun membatasi tindakan manajemen laba. Penerapan konservatisme akuntansi dapat memberikan sinyal kepada investor untuk memberikan penilaian lebih dan memberikan premium tinggi terhadap nilai saham perusahaan. Teori sinyal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Hanung (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat dilakukan penurunan hipotesis:

H_{2d}:Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

C. Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian